

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman PEN. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi NTT masih memiliki tabungan netto, sehingga menghasilkan nilai DSCR sebesar 24,0 pada tahun 2022, sebesar 29,6 pada tahun 2023, dan sebesar 8,1 pada tahun 2024. Nilai-nilai tersebut berada jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, daerah harus memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5.
2. Strategi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam menunjang pengembalian Pinjaman PEN yaitu melalui mekanisme pemotongan langsung dari penyaluran Dana Alokasi Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Pelaksanaan strategi ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 22 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Walaupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kemampuan dalam mengelola pinjaman dengan baik, pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dengan mengidentifikasi program-program yang bisa diprioritaskan, serta melakukan rasionalisasi belanja agar kegiatan pembangunan di tahun anggaran berikutnya dapat berjalan dengan optimal meskipun ada pemotongan DAU.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis analisis pinjaman yaitu *Debt Service Coverage Ratio*. Oleh karena itu, dapat dilakukan analisis lain yang dapat melengkapi analisis DSCR untuk memperkuat analisis terhadap pinjaman daerah. Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis biaya manfaat (*cost benefit analyze*) dalam menilai kelayakan investasi publik yang

dialokasikan dari dana Pinjaman PEN Daerah. Sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan investasi publik yang dibiayai dengan pinjaman PEN.